



PROVINSI SUMATERA BARAT

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

DATA PROFIL DAERAH ELPPD PROVINSI

NO	KATEGORI	DATA WAJIB ISI
1.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	TIPE KANTOR	TIPE “ B “
3.	ALAMAT OPD	Jln. Setia Budi No. 15 Padang
4.	ALAMAT EMAIL OPD	http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id dpmpstspsumbar@gmail.com
5.	NO TELFON OPD	Telp. 0751. 811341, 811343 Fax. 0751.811342
6.	NAMA KEPALA OPD	ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
7.	URUSAN	URUSAN PENANAMAN MODAL
8.	STATUS AKTIF	AKTIF
9.	TOTAL PAGU ANGGARAN OPD	Rp. 15.176.695.922,-
10.	FOTO	-
11.	TITIK KOORDINAT OPD	Lat - 0.938679° Long 100.360467°

PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2024
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304111997031001

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

B. TUPOKSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

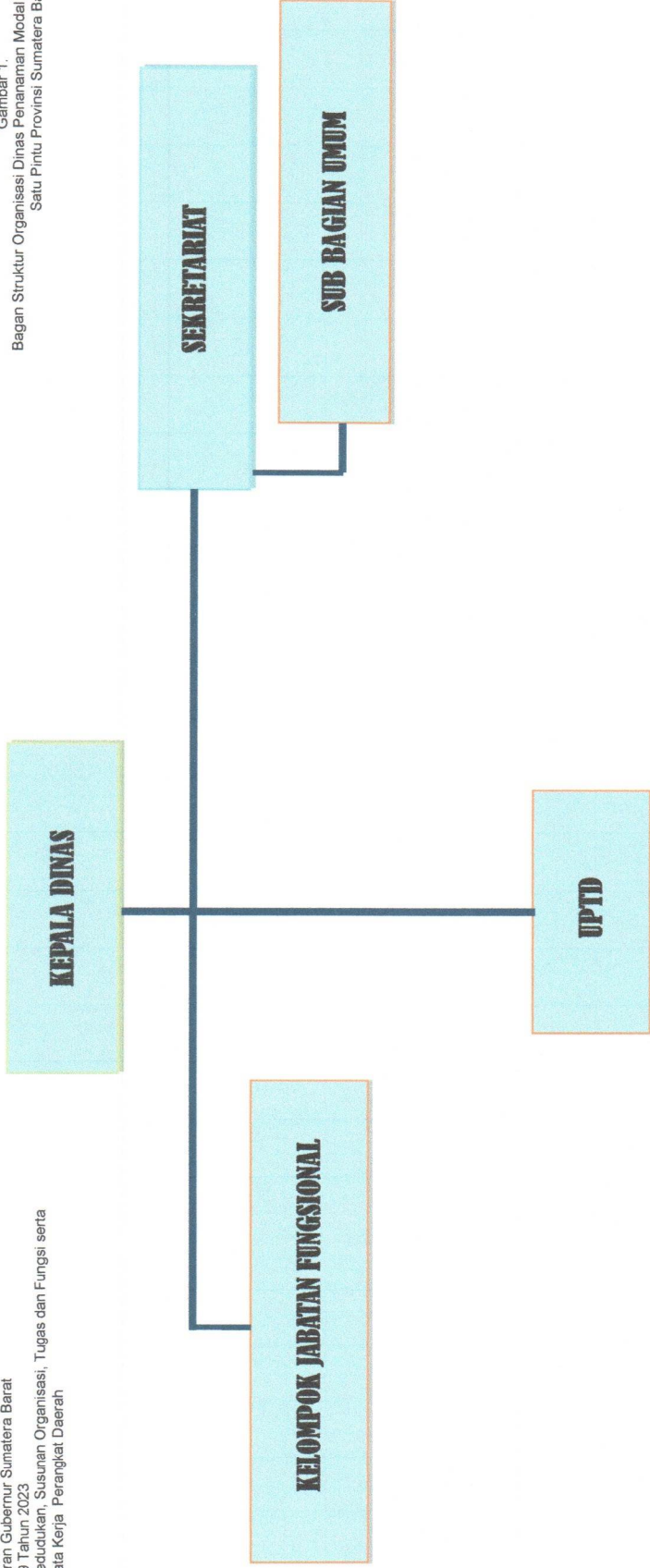
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
- c. Koordinator Jabatan Fungsional
- d. UPTD

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.

2023

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 29 Tahun 2023
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah

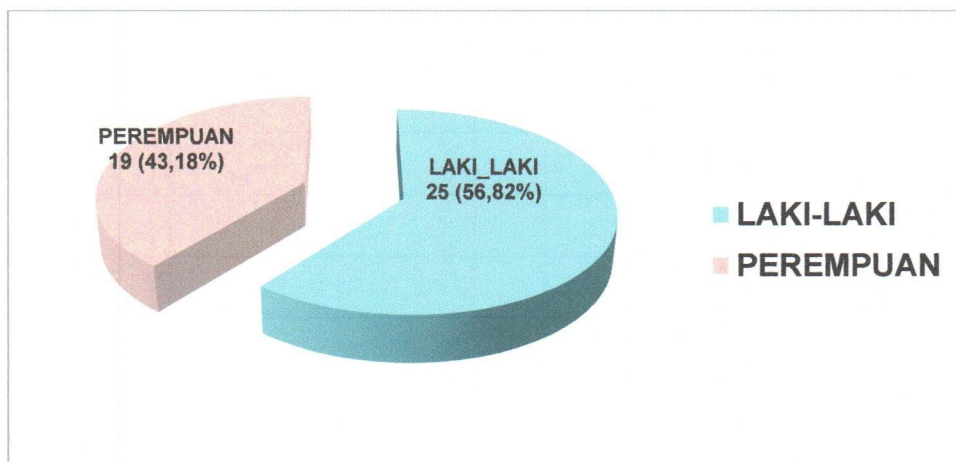
Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 46 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 25 orang (56,82%) laki-laki dan 19 orang (43,18%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

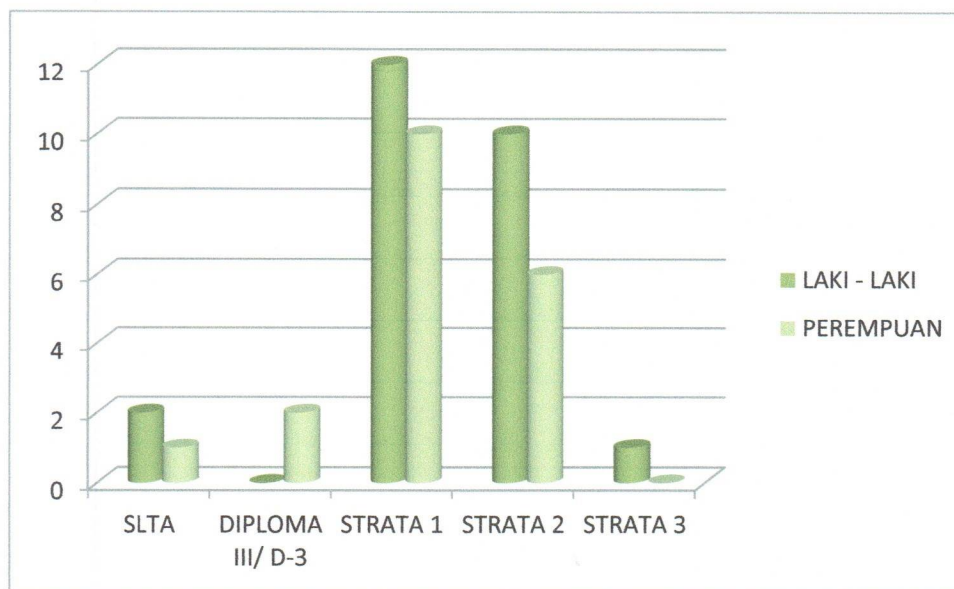
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	2	1	3	6,82%
3	DIPLOMA III/ D-3	-	2	2	4,55%
4	STRATA 1	12	10	22	50,00%
5	STRATA 2	10	6	16	36,36%
6	STRATA 3	1	-	1	2,27%
	JUMLAH	25	19	44	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,18% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 6,82% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

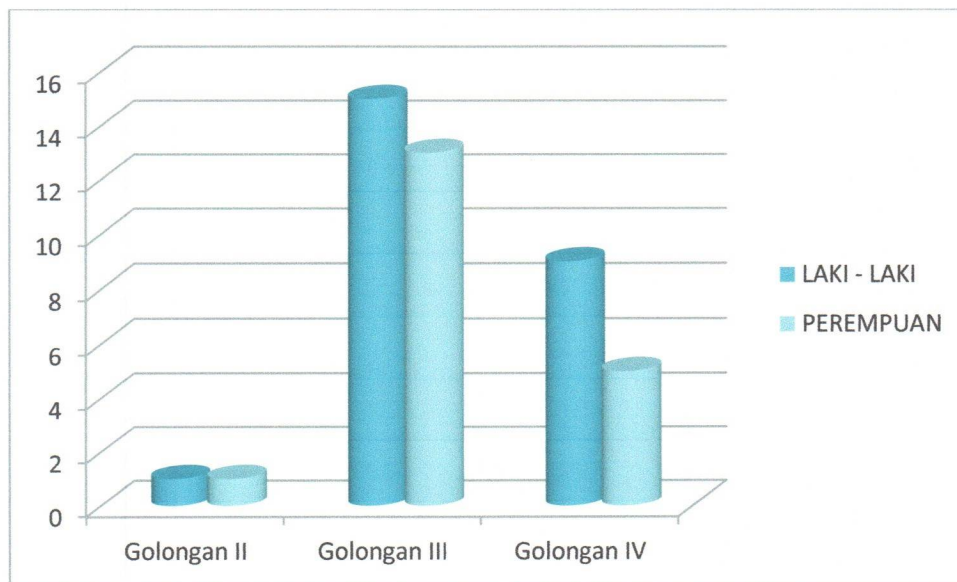
Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	1	1	2	4,55%
3	Golongan III	15	13	28	63,64%
4	Golongan IV	9	5	14	31,81%
	JUMLAH	25	19	44	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,45% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

C. ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Anggaran dari APBD Provinsi Sumatera

Barat sebesar Rp. 15.175.695.922,- (perubahan anggaran) yang terdiri dari :

BELANJA DAERAH	: Rp.	15.176.695.922,-
a. Belanja Operasi	: Rp.	15.066.827.012,-
▪ Belanja Pegawai	: Rp.	7.029.388.783,-
▪ Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	8.037.438.229,-
b. Belanja Modal	: Rp.	109.868.910,-
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	109.868.910

D. IVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.241.299.633,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.604.892.769,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 636.406.864,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang pelayanan perizinan, ruangan bidang perencanaan, ruangan pengendalian, ruangan pengaduan dan ruangan bidang promosi. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat yang dipergunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

Tabel 1.4.
Daftar Kendaraan Dinas
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	Honda	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
3	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
4	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Honda Accord	Operasional Administrasi
6	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional Administrasi
7	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
8	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
9	Mini Bus	Pajero Sport	Operasional Kepala Badan

10	Mobil Double Gardan	Mitsubishi	Operasional Administrasi
11	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi

Sumber :Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP 2023

F. INFORMASI DELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah khusus pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023

TAHUN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2021	1.286	954	2.240	1.286 Izin; 954 Non Perizinan
2022	892	1.119	2.011	892 Izin; 1.119 Non Perizinan
2023	2.139	1.709	3.848	2.139 Izin; 1.709 Non Perizinan
TOTAL	4.317	3.782	8.099	4.137 Izin; 2.782 Non Perizinan

Sumber :Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2021 -2023

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat tercapai dengan tersusunnya Buku Potensi dan Peluang Investasi kabupaten/kota se Sumatera Barat serta Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi dengan link. sipopei.sumbarprov.go.id.
2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator terselenggaranya Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha nasional/asing tercapai terlaksana di Kab. Pasaman Barat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau 35 kemitraan.
3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Terkait dengan Keikutsertaan Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh DPM & PTSP dalam rangka mempromosikan potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Barat, untuk tahun 2022 tidak ada keikutsertaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam pameran dan sejenisnya.
4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat provinsi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada

Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 2.139 izin dan 1.709 Non Perizinan. Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor Perindustrian, Perdagangan, Pemukiman dan Perumahan. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Sektor	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha Non OSS	Perizinan Non Berusaha	Non Perizinan	Jumlah	Tepat Waktu PTSP %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perikanan dan Kelautan	811	-	-	-	811	94%
2	Kehutanan	7	33	1	9	50	83%
3	Kesehatan	27	-	-	-	27	85%
4	Perhubungan	24	-	5	81	110	85%
5	Ketenagakerjaan	4	-	-	4	8	85%
6	Perindustrian	817	-	-	-	817	-
7	Perdagangan	5	-	-	1	6	80%
8	Pertanian	92	-	-	-	92	80%
9	Pendidikan	-	-	20	-	20	77%
10	Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	119	119	95%
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	157	8	-	-	165	86%
12	Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	3	34	-	-	37	85%
13	PSDA	-	-	-	-	-	-
14	SOSIAL	-	-	24	3	27	86%

15	Pemukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	0%
16	Pariwisata	32	-	-	-	32	0%
17	Lingkungan Hidup	-	35	-	-	35	83%
18	Koperasi UMKM	-	-	-	-	-	-
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1492	1492	98%
JUMLAH		1979	110	50	1.709	3.848	86%
TOTAL					2139	1.709	3.848

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2023

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dan sudah dilaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sumber dana dari APBD dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dari Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi 100% berupa 1 laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan untuk Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sosialisasi kebijakan Penanaman Modal terkait Perizinan OSS RBA sebanyak 575 orang dari target sebanyak 575 orang sehingga capaian kinerjanya 100% serta 10 PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya yang ditargetkan terlaksana 10 PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) RBA juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha melalui media masa, yakni media cetak sebanyak 5 kali.

BAB II DOKUMEN PERENCANAAN

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dibunyikan bahwa Renstra - SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanaman

modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2021–2026;

3. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026, sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

VISI

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, dan sejalan dengan Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;**

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

B. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUNAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2021 dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terjadi perubahan yang sangat signifikan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terkait Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Program, Kegiatan serta Pemutakhirannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023, maka Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8 Kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan);
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan);
3. Program Promosi Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan);
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan);
5. Program Pelayanan Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan);
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan).

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan DPM & PTSP Tahun Anggaran 2023, adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.876.936.725,-	8 kegiatan, 24 Sub Kegiatan
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.229.794.450,-	1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan
III.	Program Promosi Penanaman Modal	471.900.650,-	1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.151.176.997,-	1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan
V.	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.408.684.900,-	1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38.202.200,-	1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan
JUMLAH		15.176.695.922,-	6 program 13 kegiatan 35 Sub Kegiatan

Sumber : DPPA DPM & PTSP Tahun 2023

BAB III
DATA KINERJA DAN KEUANGAN

A. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 15.176.695.922,- yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi		:	Rp.	15.066.827.012,-
• Belanja Pegawai		:	Rp.	7.029.388.783,-
• Belanja Barang dan Jasa		:	Rp.	8.037.438.229,-
b. Belanja Modal		:	Rp.	109.868.910,-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin		:	Rp.	109.868.910,-

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2023 untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO. URUT	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	KET
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	15.176.695.922	

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.876.936.725	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.230.030	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.302.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.928.030	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.056.222.613	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.874.188.783	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.416.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/-Triwulanan/Semesteran SKPD	23.617.830	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.400.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.400.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.646.190	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.736.940	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.318.000	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.688.309	
E	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.604.100	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.602.990	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.103.296	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.080.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750.391.751	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.080.000	
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.996.310	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.265.920	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.265.920	

G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.052.974.085	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.654.500	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.100.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.219.585	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.439.940	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.967.500	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.827.000	
22	Pemeliharaan Mebel	7.000.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.235.440	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.410.000	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.229.794.450	
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.229.794.450	
25	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	72.260.900	
26	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1.157.533.550	
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	471.900.650	
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	471.900.650	
27	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	65.655.000	
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	406.245.650	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.408.684.900	
A	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.467.706.650	
29	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.408.684.900	

30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	97.498.000	
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	129.062.350	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.151.176.997	
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.151.176.997	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9.110.000	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	721.815.700	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	420.251.297	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38.202.200	
A	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	38.202.200	
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	38.202.200	
JUMLAH		15.176.695.922	

B. REALISASI FISIK DELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. **9.876.936.725,-** dan dapat direalisasi sebesar Rp. **9.798.907.903,-** atau sebesar **99,21%**. Realisasi

Fisik Pelaksanaan kegiatan pada program ini pada umumnya 100% dan rincian realisasi untuk masing-masing sub kegiatan adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

A. **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran:

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 (dua) dokumen, dengan capaian kinerja 150%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

2. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran:

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

B. **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keluaran:

Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan, Gaji ke 13 dan Gaji ke 14 serta Tunjangan dan Insentif atas retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk 45 ASN, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Keluaran:

Terbayarkannya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan dan Pengurus Barang, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD.

Keluaran:

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semester SKPD sebanyak 13 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah**Keluaran:**

Terasuransikan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 3 unit, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Daerah selama 12 bulan.

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**Keluaran:**

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 70 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

2. **Sub Kegiatan** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman ASN untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi peraturan perundang – undangan sebanyak 14 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 17 jenis, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 jenis, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**Keluaran:**

Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 34 jenis, dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Intern sebanyak 15 kali beserta makanan serta minuman yang disediakan untuk pertemuan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**Keluaran:**

Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan sebanyak 5 jenis dan penggandaan sebanyak 21.258 lembar dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Keluaran:

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan / koran dan peraturan perundangan – undangan sebanyak 6 media, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

6. **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran:

Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan 62 dokumen laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

- F. **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan** Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Keluaran:

Terlaksananya Pengadaan Mebel sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran:

Terlaksananya pengelolaan surat keluar sebanyak 630 surat dengan capaian kinerja sebesar 157,50%

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran:

Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik sebesar 41500 kwh dan telepon sebanyak 3 rekening dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran:

Terlaksananya pembayaran jasa lembaga pengamanan kantor, jasa lembaga penyedia cleaning service, jasa lembaga penyedia jasa sopir dan tenaga pendamping OSS sebanyak 18 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor sebanyak 1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2 dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor sebanyak 7 unit roda 4 dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

3. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Mebel

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan mebel kantor sebanyak 5 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

4. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 55 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

5. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

A. **Kegiatan** Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal untuk 80 orang dan 1 dokumen Evaluasi Pelaksanaan RUPM dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Memudahkan Calon Investor Mendapatkan Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Bara

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya FK Pelaku Usaha Daerah 5 kali dengan mendapatkan kemitraan 35 kemitraan dengan jumlah peserta sebanyak 512 orang, terlaksananya BimtekPemetaan Peluang Investasi 1 kali dengan peserta 50 orang serta jalannya 2 aplikasi sipopei dan simitra dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Memudahkan Calon Investor Mendapatkan Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Barat

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- A. **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya kegiatan strategi promosi peluang investasi 1 kali pertemuan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat

2. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi

Keluaran:

Terlaksananya penyebaran informasi terkait penanaman modal sebanyak 5 kali, terlaksananya keikutsertaan DPMPSTSP dalam kegiatan promosi investasi sebanyak 3 event serta membantu kab/kota dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan investasi, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Berminatnya calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- A. **Kegiatan** Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Keluaran:

Terlaksananya penerbitan izin dan non perizinan dengan umlah penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 3.848 izin dan non izin dari target sebanyak 2.944 izin dan non izin dengan capaian kinerja sebesar 130,71%. dan tepat waktu dengan kinerja 86% dengan capaian kinerja 100,56% dan tersedianya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi dengan capaian kinerja 100%

Hasil:.

Penerbitan izin dan non izin tepat waktu dengan target kinerja 85% dengan capaian kinerja 100%.

2. **Sub Kegiatan** Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pengukuran indeks kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% sebanyak 2 kali dengan capaian kinerja 100%

Hasil:.

Survei hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar nilai interval konversi IKM 96,48% dan nilai interval IKM sebesar 3,81.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Keluaran:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan sebanyak 3 kali dengan capaian kinerja 100% dan terfasilitasi/termediasinya pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan sebanyak 14 pengaduan dengan capaian kinerja 100%

Hasil:.

Terfasilitasi dan Termediasinya Pengaduan izin Yang Bermasalah.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**A. Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**Keluaran:**

Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penanaman modal kepada 6 Perusahaan dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:.

Terciptanya Koordinasi terkait Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari fasilitasi permasalahan investasi sebanyak 10 perusahaan PMA/PMDN dengan capaian kinerja sebesar 100%, terlaksananya bimbingan dan sosialisasi tentang kemudahan berusaha sebanyak 575 dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang sebanyak 84 UMKM/perusahaan dari target 30 perusahaan dengan capaian kinerja sebesar 280%

Hasil:.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SITEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- A. **Kegiatan** Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keluaran:

Terlaksananya pengolahan, penyajian dan pemantauan data terkait perizinan dan penanaman modal dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

B. DATA KINERJA KEUANGAN

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**A. Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 72.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.101.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,72%.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 31.928.030,-

dan terealisasi sebesar Rp. 31.845.050,- atau capaian kinerja keuangan 99,74%.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah sebesar Rp. 6.874.188.783,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.819.880.925,- atau capaian kinerja keuangan 99,21%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 158.416.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.056.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,14%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebesar Rp. 23.617.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.398.400,- atau capaian kinerja keuangan 99,07%.

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengamanan Barang Milik Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 18.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.364.350,- atau capaian kinerja keuangan 99.81%.

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. sebesar Rp. 45.736.940,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.377.209,- atau capaian kinerja keuangan 99,21%.

2. **Sub Kegiatan** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 51.909.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.618.016,- atau capaian kinerja keuangan 99,44%.

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 25.604.100,- dan terealisasi

sebesar Rp. 25.358.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,04%.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 102.602.990,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.291.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,70%.

4. **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 91.979.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.839.800,- atau capaian kinerja keuangan 99,85%.

5. **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 20.103.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.102.750,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

6. **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 17.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.040.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,77%.

7. **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 750.391.751,- dan terealisasi sebesar Rp. 750.096.973,- atau capaian kinerja keuangan 99,96%.

8. **Sub Kegiatan** Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 149.996.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 147.984.028,- atau capaian kinerja keuangan 98,66%.

F. **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 7.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.225.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,44%.

G. **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 23.654.500,-

dan terealisasi sebesar Rp. 23.269.222,- atau capaian kinerja keuangan 98,37%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 152.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.259.792,- atau capaian kinerja keuangan 99,45%.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 877.219.585,- dan terealisasi sebesar Rp. 865.696.069,- atau capaian kinerja keuangan 98,69%.

H. **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 45,967,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 44,727,384,- atau capaian kinerja keuangan 97,30%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 178.827.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 175.971.835,- atau capaian kinerja keuangan 98,40%.

3. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Mebel

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.950.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,29%.

4. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 43.235.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.176.600,- atau capaian kinerja keuangan 97,55%.

5. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 107.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.278.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,88%.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I. **Kegiatan** Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi sebesar Rp. 72.260.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.074.400,- atau capaian kinerja keuangan 99,74%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi sebesar Rp. 1.157.533.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.135.677.794,- atau capaian kinerja keuangan 98,11%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

J. **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebesar Rp. 65.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.544.625,- atau capaian kinerja keuangan 99,83%.

2. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebesar Rp. 406.245.650,- dan

teralisasi sebesar Rp. 405.480.598,- atau capaian kinerja keuangan 99,81%.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

K. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp.. 2.182.124.550,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.161.931.674,- atau capaian kinerja keuangan 99,07%.

2. **Sub Kegiatan** Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 97.498.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 97.348.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,85%.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 129.062.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.925.450,- atau capaian kinerja keuangan 99,89%.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

L. *Kegiatan* Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 9.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.110.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

2. *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 721.815.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 694.335.475,- atau capaian kinerja keuangan 99,19%.

3. *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 420.251.297,- dan terealisasi sebesar Rp. 419.879.960,- atau capaian kinerja keuangan 99,91%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

M. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp. 38,202,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 37,963,200,- atau capaian kinerja keuangan 99,37%.

BAB. IV

PENUTUP

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada permasalahan yang cukup berarti, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan bahkan ada beberapa kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

Secara keseluruhan realisasi fisik dan realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diatas rata – rata realisasi fisik dan keuangan Provinsi Sumatera Barat, dimana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,01% dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Barat yang realisasi fisiknya sebesar 99.46 % dan realisasi keuangan sebesar 94.28% berdasarkan Data Dashboard Pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304111997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 31 Desember 2023**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOL-RU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	ADIB ALFIKRI,S.E.,M.Si 19730413.199703.1.001 13-04-1973	IV/d	01-10-2023	KEPALA DPMP&PTSP Eselon : IIA	31-01-2022	3 Tahun	Strata 2 (S2)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Universitas Andalas	LK
GOLONGAN RUANG: IV/B										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	YUDHI IGHAN ARIANTO, ST 197609012002121007 01-09-1976	IV/b	01-10-2023	SEKRETARIS Eselon : IIIA	14-02-2023	0 Tahun 10 bulan	STRATA 1 (S1)	S-1 TEKNOLOGI MINERAL-TEKNIKPERTA MBANGAN	-	LK
GOLONGAN RUANG: III/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
3	KISMEN ATA, SP 19770222.200501.1.011 22-02-1977	III/d	01-04-2023	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	23-08-2019	3 Tahun 2 Bulan	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
YANG MEMENUHI KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 31 Desember 2023**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOL-RU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	ADIB ALFIKRI, S.E., M.Si 19730413 199703 1 001 13-04-1973	IV/d	01-10-2019	KEPALA DPM&PTSP Eselon : II.A	31-01-2022	3 Tahun	Strata 2 (S2)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Universitas Andalas	LK
GOLONGAN RUANG: IV/B										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	YUDHI ICHSAN ARIANTO, ST 197609012002121007 01-09-1976	IV/b	01-10-2023	SEKRETARIS Eselon : III.A	14-02-2023	0 Tahun 10 bulan	STRATA 1 (S1)	TEKNOLOGI MINERAL-TEKNIKPERTA MBANGAN	-	LK
GOLONGAN RUANG: III/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
3	KISMEN ATA, SP 19770222 200501 1 011 22-02-1977	III/d	01-04-2015	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	23-08-2019	3 Tahun 2 Bulan	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
YANG MEMENUHI DIKLATPIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 31 Desember 2023**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOLRU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1.	KISMEN ATA, SP 19770222 200501 1 011 22-02-1977	III/d	01-04-2023	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	21-08-2019	-	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL
YANG MEMENUHI KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 31 Desember 2023**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOLRU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/b										
1	ALRIFJON, S.Sos, MM NIP. 19661207 198903 1 004 07-12-1966	IV/b	01-10-2021	PENATA PENANAMAN AHLI MADYA	30/12/2022		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	LK
2	ETNA LELI, S.Sos, MM 19650124 199101 2 001 24-01-1965	IV/b	01-10-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	31/12/2021		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	PR
3	FIRDAUS, SH, MH 19660626 198811 1 001 03-06-1960	IVb	01-04-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	31/12/2021		STRATA 2 (S2)	HUKUM HUMANITARA	UNES	LK
GOLONGAN RUANG: IV/a										
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
4	YUNIARTI, S.Pd, M.Si 19690601 199803 2 002 01-06-1969	IV/a	01-04-2014	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	31/12/2021		STRATA 2 (S2)	EKONOMIKA PEMBANGUNAN	UGM YOGYAKARTA	PR
5	ROY DEFRINALDI EKA PUTRA, ST, MM 19761001 200212 1 005 19-02-1975	IV/a	01-04-2014	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	31/12/2021		STRATA 2 (S2)	EKONOMIKA PEMBANGUNAN	UGM YOGYAKARTA	LK
6	SYAFWARDI, SE, M.Si 19680706 198703 1 001 PADANG, 06-07-1968	IV/a	01-04-2017	PERENCANA AHLI MUDA	31/12/2021		STRATA 2 (S2)	AKUNTANSI	UGM YOGYAKARTA	LK
7	HARDI, SE, MM 19751109 20003 1 003 09-11-1975	IV/a	01-04-2018	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	30/12/2022		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	LK
8	YUSNARRELIS, S.H 196812291989032002 29-12-1968	IV/a	01-04-2022	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	30/12/2022		STRATA 1 (S1)			PR
9	EGY JANUARDI, S.STP, M.Si 19870622 200701 1 001 22-06-1987	IV/a	01-10-2022	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	30/12/2022		STRATA 2 (S2)	MAGISTER SAINS	UNAND PADANG	LK
RUANG: III/d										
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
10	MAMAN, S.Hut 19690102 200003 1 004 02-01-1969	III/d	01-04-2012	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	30/12/2022		STRATA 2 (S2)	SARJANA KEHUTANAN	UGM	LK
11	MAINELIZA, SE 19780524 200701 2 004 24-05-1978	III/d	01-10-2019	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	30/12/2022		STRATA 1	MANAJEMEN PERBANKAN	-	PR
13	ADI USMAN, S.Pt 19770901 200604 1 009 01-09-1977	III/d	01-04-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	31/12/2021		STRATA 1 (S1)	PETERNAKAN	UNAND PADANG	LK

14	M. KHADAFI, SE, M.Cio 19821218 200802 1 001 18-12-1982	III/d	01-04-2020	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA L	31/12/2021	STRATA 2 (S2)	M.CIO	UNP PADANG	LK
15	ASRUL, SE 19810830 200902 1 003 30-08-1980	III/d	01-04-2021	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	30/12/2022	STRATA 1 (S1)	AKUNTANSI	UGM YOGYAKARTA	LK
16	ASWANDI, SE 19850722 200902 1 001 22-07-1985	III/d	01-04-2021	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	30/12/2022	STRATA 2 (S2)	AMINISTRASI PUBLIK	UNP PADANG	LK
17	YENI FITRIA, SS.M.CIO 19800202 201001 2 008 02-02-1980	III/d	01-04-2022	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	30/12/2022	STRATA 2 (S2)	M.CIO	UNP PADANG	PR
18	AMRIZAL, S.Sos 19691115 199403 1 005 15-11-1969	III/d	01-10-2017	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA L	31/12/2021	STRATA 1 (S1)	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	STISIPOL	LK
GOLONGAN RUANG: III/c									
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
18	RIO SAHZAN, SS, SE 19780612 200803 1 001 12-06-1978	III/c	01-04-2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA L	31/12/2021	STRATA 1 (S1)	SASTRA INGGRIS	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197304131997031001

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output
 A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi			Capain Kinerja 9 (8:7)	Sumber Data	Ket
				6	Target	Realisasi			
12	Penanaman Modal	3	5	6	7	8	10	11	
1		1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Perda ttg. pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	1	1		Tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal	
2		2	SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah SOP ttg. pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	0		Dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	
3		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	0		Belum dilaksanakan Evaluasi karena Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif masih dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur	
4		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	2		Dilaksanakan Bisnis Forum di Batam dan di Denpasar	
5		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	1	1		Mengikuti Kegiatan PENAS TANI TAHUN 2023 TINGKAT NASIONAL yang dilaksanakan di Kota Padang	
6		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4	4		Penerimaan misi penanaman modal dari Malaysia, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Asean Middle East Business berminat untuk berinvestasi di Sumatera Barat	
7		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilaksanakan	3.848	4.328	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	DPMPSTP memberikan Layanan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara lain yaitu Layanan Pendampingan. Layanan Konsultasi dan Layanan Prioritas penyelenggaraan Perizinan.	
8		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.944	3.848		Target 2944 perizinan dan non perizinan, Realisasi 3848 perizinan dan non perizinan	
9		9	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal	5.602.670.000.000	7.211.987.280.000		Berdasarkan kondisi sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2023, untuk realisasi investasi PMA dan PMDN tercapai sebesar Rp. 7.211.987.280.000,- dari target sebesar Rp. 5.602.670.000.000,-.	
10		10	Pembinaan aparat penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Pembinaan aparat penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	450*	450**		Untuk tahun 2023 kegiatan Pembinaan untuk Aparatur Provinsi dan kondisi triwulan 3 Kabupaten/Kota 450 orang dalam bentuk Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
11		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	10*	10**		Pembinaan Penanaman Modal terhadap PMA dan PMDN dilakukan dalam bentuk Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi yang dihadapi Perusahaan PMA dan PMDN. Untuk target 2023 sebanyak 10 perusahaan PMA dan PMDN dan terealisasi sebanyak 10 perusahaan PMA dan PMDN kondisi triwulan 3	
12		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	1	1		Data Perizinan dan Non Perizinan dapat berupa jenis Perizinan, Tata Cara serta PERSYARATAN, Pengaduan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	

Kepala DPM & PTSP
 Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197304131957031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
TAHUN 2023

NO	URISAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME	KUMUS PERHITUNGAN	CAPAIAN KINEJIA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	7	8	9
18.	PENANAMAN MODAL	1.	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	$= \frac{\text{(Jumlah Investasi Tahun 2023 - Jumlah Investasi Tahun 2022)}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2022}} \times 100\%$ $= \frac{(7.211.987.280.000,- - 5.201.754.149.500,-)}{5.201.754.149.500,-} \times 100\%$ $= \frac{2.010.233.139.500}{5.201.754.149.500} \times 100\%$ $= 38,65\%$	483,13%	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP	Realisasi Investasi PMA dan PM2V Akadab s.d. triwulan 3

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197504131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
 PADANG

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN
BERDASARKAN SEKTOR
TAHUN 2022

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL ASING (PMA)		PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)		TOTAL	
		USD (ribu)	%	RUPIAH (juta)	%	RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Sektor Primer	27.457,03	19,37	1.152.441,38	36,387	1.546.449.760.500	29,73
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Peternakan	11.289,25	7,96	664.618,66	20,98	826.619.397.500	15,89
2.	Kehutanan	-	-	166.397,40	5,25	166.397.400.000	3,20
3.	Perikanan	-	-	1.165,30	0,04	1.165.300.000	0,02
4.	Pertambangan	16.167,78	11,4	320.260,02	10,11	552.267.663.000	10,62
II.	Sektor Sekunder	99.414,26	70,12	551.314,36	17,41	1.977.908.991.000	38,02
5.	Industri Makanan	61.676,89	43,50	400.366,23	12,64	1.285.429.601.500	24,71
6.	Industri Tekstil	-	-	25,00	0	25.000.000	0,00
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	25,00	0	25.000.000	0,00
8.	Industri Kayu	-	-	34,30	0	34.300.000	0,00
9.	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	17.330,89	0,55	17.330.890.000	0,33
10.	Industri Kimia dan Farmasi	31.092,70	21,93	23.021,34	0,73	469.201.585.000	9,02
11.	Industri Karet dan Plastik	6.509,07	4,59	561,80	0,02	93.966.954.500	1,81
12.	Industri Mineral Non Logam	135,60	0,10	108.183,90	3,42	108.183.900.000	2,08
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-	133,80	0	133.800.000	0,00
14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	-	-	1.123,00	0,04	1.123.000.000	0,02
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	-	-	409,10	0,01	409.100.000	0,01
17.	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
III.	Sektor Tersier	14.908,89	10,52	1.463.432,97	46,21	1.677.375.541.500	32,25
18.	Listrik, Gas dan Air	6.559,68	4,63	246.662,10	7,79	340.793.508.000	6,55
19.	Konstruksi	20,48	0,01	222.310,53	7,02	222.604.418.000	4,28
20.	Perdagangan dan Reparasi	454,86	0,32	353.210,65	11,15	359.737.891.000	6,92
21.	Hotel dan Restoran	139,77	0,1	313.339,50	9,89	315.345.199.500	6,06
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	6.215,81	4,38	58.485,72	1,85	147.682.593.500	2,84
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	569,36	0,4	77.098,05	2,43	85.268.366.000	1,64
24.	Jasa Lainnya	948,93	0,67	130.838,37	4,13	144.455.515.500	2,78
IV.	UMK	-	-	61.488,05	1,94	61.488.050.000	1,18
TOTAL		141.780,18	100,00	3.167.188,71	100,00	5.201.734.293.000	100,00

Kepala DPM & FTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>
 PADANG

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN
BERDASARKAN SEKTOR
TAHUN 2023

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL ASING (PMA)		PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)		TOTAL	
		USD (ribu)	%	RUPIAH (juta)	%	RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Sektor Primer	19.192,70	28,61	1.838.741,70	29,57	2.122.793.660.000,00	29,43
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Peternakan	9.401,90	14,01	1.527.530,60	24,56	1.666.678.720.000,00	23,11
2.	Kehutanan	-	-	21.963,90	0,35	21.963.900.000,00	0,30
3.	Perikanan	-	-	4.392,60	0,07	4.392.600.000,00	0,06
4.	Pertambangan	9.790,80	14,59	284.854,60	4,58	429.758.440.000,00	5,96
II.	Sektor Sekunder	21.843,10	32,56	475.922,00	7,65	799.199.880.000,00	11,08
5.	Industri Makanan	18.104,70	26,98	384.889,00	6,19	652.838.560.000,00	9,05
6.	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
8.	Industri Kayu	-	-	663,00	0,01	663.000.000,00	0,01
9.	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	11.345,20	0,18	11.345.200.000,00	0,16
10.	Industri Kimia dan Farmasi	3.668,30	5,47	1.641,50	0,03	55.932.340.000,00	0,78
11.	Industri Karet dan Plastik	70,10	0,10	11.940,10	0,19	12.977.580.000,00	0,18
12.	Industri Mineral Non Logam	-	-	65.256,20	1,05	65.256.200.000,00	0,90
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-	6,50	0,00	6.500.000,00	0,00
14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	0,00	-	-	-	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transporasi Lainnya	-	-	177,80	0,00	177.800.000,00	0,00
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	-	-	2,70	0,00	2.700.000,00	0,00
17.	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
III.	Sektor Tersier	26.056,80	38,84	1.096.953,10	17,64	1.482.593.740.000,00	20,56
18.	Listrik, Gas dan Air	12.051,30	17,96	144.952,40	2,33	323.311.640.000,00	4,48
19.	Konstruksi	-	-	348.990,10	5,61	348.990.100.000,00	4,84
20.	Perdagangan dan Reparasi	552,00	0,82	136.698,30	2,20	144.867.900.000,00	2,01
21.	Hotel dan Restoran	1.003,20	1,50	76.425,60	1,23	91.272.960.000,00	1,27
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	9.782,90	14,58	249.174,40	4,01	393.961.320.000,00	5,46
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.792,80	2,67	17.520,70	0,28	44.054.140.000,00	0,61
24.	Jasa Lainnya	874,60	1,30	123.191,60	1,98	136.135.680.000,00	1,89
IV.	UMK	-	-	2.807.400,00	-	2.807.400.000.000,00	38,93
TOTAL		67.092,60	100,00	6.219.016,80	100,00	7.211.987.280.000,00	100,00

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023

No	Sektor	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha Non OSS	Perizinan Non Berusaha	Non Perizinan	Jumlah	Tepat Waktu PTSP %
1	2	4	5	6	6	7	8
1	Perikanan dan Kelautan	811	-	-	-	811	94%
2	Kehutanan	7	33	1	9	50	83%
3	Kesehatan	27	-	-	-	27	85%
4	Perhubungan	24	-	5	81	110	85%
5	Ketenagakerjaan	4	-	-	4	8	85%
6	Perindustrian	817	-	-	-	817	-
7	Perdagangan	5	-	-	1	6	80%
8	Pertanian	92	-	-	-	92	80%
9	Pendidikan	-	-	20	-	20	77%
10	Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	119	119	95%
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	157	8	-	-	165	86%
12	Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	3	34	-	-	37	85%
13	PSDA	-	-	-	-	-	-
14	SOSIAL	-	-	24	3	27	86%
15	Pemukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	0%
16	Pariwisata	32	-	-	-	32	0%
17	Lingkungan Hidup	-	35	-	-	35	83%
18	Koperasi UMKM	-	-	-	-	-	-
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1492	1492	98%
JUMLAH		1979	110	50	1.709	3.848	86%

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
REKAPITULASI LAPORAN KONSULTASI PERIZINAN
TAHUN 2023

NO	SEKTOR IZIN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Perikanan dan Kelautan	1.222	
2	Kehutanan	67	
3	Kesehatan	27	
4	Perhubungan	118	
5	Ketenagakerjaan	8	
6	Perindustrian dan Perdagangan	825	
7	Pendidikan	22	
8	Peternakan dan Kesehatan Hewan	119	
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	167	
10	Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	37	
11	Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	-	
12	Sosial	28	
13	Pariwisata	31	
14	Lingkungan Hidup	71	
15	Koperasi dan UMKM	-	
16	Pertanian	92	
17	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.494	
Total		4.328	

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAFTAR PENGHARGAAN / PRESTASI 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA PENGHARGAAAN	TINGKAT PROVINSI	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Kemudahan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Kemudahan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024	NOMINE 6	
2.	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Penilaian OPD Terbanyak Jumlah Penerapan Inovasi	Peringkat 2	

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

KKP &
IPP
2023

SUMBAWA SUMBAWA BARAT



S. HARILAH ARSADULLAH, CIBEHUR
WANSHARULLAH, S.P. BERHUR
IR. AUDY JOEHALDI, WAKTI GUBESER

DEPARTEMEN KONTROL
DELAPAN PUNA DAN
SUDAN PUN
PUNYI SUDAN SUDAN
SUDAN SUDAN
SUDAN SUDAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Memberikan Penghargaan Kepada:

**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tiga Terbaik Kategori OPD Pemerintah Provinsi

**KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

Padang, November 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REKAPITULASI PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023

NO	URAIAN	TANGGAL	LOKASI
1	2	3	4
1	PENAS TANI	10 - 15 JUNI 2023	KOTA PADANG

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

Data Kegiatan Pameran dan Forum Bisnis Tahun 2023

No.	Nama Even	Waktu	Lokasi	Dokumentasi
1.	Pameran Panas Tani	10 s.d. 15 Juni 2023	Kota Padang	





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REKAPITULASI FORUM BISNIS ONE ON ONE MEETING
TAHUN 2023

NO	URAIAN	TANGGAL	LOKASI
1	2	3	4
1	WSIF BATAM	22-Mei-23	HOTEL HARRIS KOTA BATAM
2	WSIF DENPASAR	19-Sep-23	ASTON HOTEL DENPASAR

Kepala DPM & FTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

2.	WSIF Batam	22 Mei 2023	Harris Hotel Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	
				
			Aston Denpasar Kota Denpasar, Provinsi Bali	
3.	WSIF Denpasar	19 September 2023		




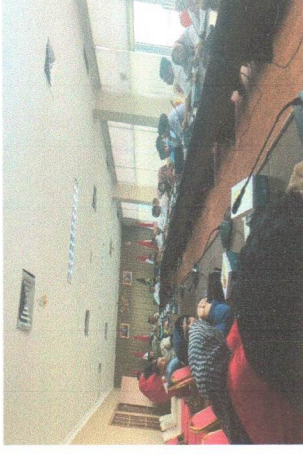


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REKAPITULASI PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023

NO	URAIAN	TANGGAL	LOKASI
1	2	3	4
1	Asean Middle East Business Investment Group Company	4 s.d. 5 Februari 2023	Kab. Padang Pariaman (Perikanan) Lokasi : Tambak Udang Kec. Batang Anai Kab. Pesisir Selatan (Pariwisata) Lokasi : Pulau Cubadak
2	Dato Shohaimi Shahadan (Malaysia)	16-Agust-23	Kab. Padang Pariaman (Pariwisata dan Industri Hilir) Lokasi : Anai Land, Wisata Lubuk Bonta, Pabrik Coklat
3	Mr. Brian Swan (Amerika Serikat)	15 s.d. 16 Oktober 2023	Kab. Kep. Mentawai (Pariwisata) Lokasi : Mapadegat, Katiet, Pantai Jati
4	Dr. Khalid Muhammad Al Bahjat Ahmad Khatib Al Minangkabawi	23-Okt-23	Kab. Pesisir Selatan (Pariwisata) Lokasi : Kawasan Mandeh

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

Data Penerimaan Misi Penanaman Modal Promosi Tahun 2023

No.	Nama Calon Investor dan Asal Negara	Waktu Kunjungan	Lokasi dan Sektor Minat Investasi	Dokumentasi
1.	Asean Middle East Business Investment Group Company	4 s.d. 5 Februari 2023	<p>Kab. Padang Pariaman (Perikanan) Lokasi : Tambak Udang Kec. Batang Anai</p> <p>Kab. Pesisir Selatan (Pariwisata) Lokasi : Pulau Cubadak</p>	  
2.	Dato Shohaimi Shahadan (Malaysia)	16 Agustus 2023	<p>Kab. Padang Pariaman (Pariwisata dan Industri Hilir) Lokasi : Anai Land, Wisata Lubuk Bonta, Pabrik Coklat</p>	

			
	<p>Kab. Kep. Mentawai (Pariwisata) Lokasi : Mapadegat, Katiet, Pantai Jati</p>	<p>15 s.d. 16 Oktober 2023</p>	<p>3. Mr. Brian Swan (Amerika Serikat)</p>
	<p>Kab. Pesisir Selatan (Pariwisata) Lokasi : Kawasan Mandeh</p>	<p>23 Oktober 2023</p>	<p>4. Dr. Khalid Muhammad Al Bahjat Ahmad Khatib Al Minangkabawi</p>